

## Implementasi Aplikasi E-SAKIP Berbasis *Website* dalam Pengelolaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Banjarnegara

### *Implementation of Website-Based E-SAKIP Application in the Performance Evaluation Assessment of Government Agencies in Banjarnegara Regency*

Adi Abdul Rozaq<sup>1\*</sup>, Lahan Adi Purwanto<sup>2</sup>, Dimara Kusuma Hakim<sup>3</sup>, Supriyono<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Sains

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Dukuhwaluh, Kembaran 53182, Indonesia.

email: <sup>\*</sup>adibadulrozaq15@gmail.com, <sup>2</sup>lahanadipurwanto@ump.ac.id <sup>3</sup>dimarakusumahakim@gmail.com,

<sup>4</sup>supriyono@ump.ac.id

DOI:10.30595/jpts.v5i2.27725

#### ABSTRAK

Era digitalisasi yang semakin berkembang menuntut instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja. Banyak instansi pemerintah masih menggunakan metode manual dalam penyusunan laporan kinerja, seperti dokumen fisik atau *spreadsheet*, yang menyulitkan sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi secara *real-time*. Beberapa perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara masih kesulitan menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga proses evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis data menjadi terhambat. Hal ini dapat menyebabkan data tidak valid, pemborosan sumber daya, dan lambatnya pengambilan keputusan berbasis kinerja, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Kurangnya akses digital juga menghambat transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi e-SAKIP berbasis *website* untuk mengotomatisasi evaluasi kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan adalah *Research and Development* dengan model *Extreme Programming* dengan pendekatan *Agile*. Sistem menyediakan modul Perencanaan Kinerja (Sasaran, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi), Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang mampu membantu instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mengelola evaluasi kinerja secara sistematis, efisien, dan terstruktur. Aplikasi ini mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan transparansi, serta memudahkan akses informasi kinerja. Pengujian sistem melibatkan 44 responden menggunakan metode *System Usability Scale* (SUS). Hasil pengujian menunjukkan rata-rata skor SUS 73,24%, yang masuk dalam kategori "Good". Aplikasi berhasil meningkatkan kecepatan laporan, meminimalkan kesalahan *input* manual, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan SAKIP di lingkungan pemerintah daerah.

**Kata Kunci:** e-SAKIP, Instansi Pemerintah, Evaluasi Kinerja, *Extreme Programming (XP)*, *System Usability Scale (SUS)*.

#### ABSTRACT

*In the rapidly advancing digital era, government agencies face mounting demands to improve transparency and accountability in performance management, yet many still rely on manual reporting methods such as paper documents or spreadsheets which hinder real-time synchronization, monitoring, and evaluation. Several regional offices in Banjarnegara Regency struggle to produce accurate, timely*

reports, delaying data-driven evaluation and decision-making, causing invalid data, resource waste, and sluggish performance-based decisions that impede development goals, while limited digital access further undermines transparency and erodes public trust. This study therefore develops a web-based e-SAKIP application to automate performance evaluation for Banjarnegara's government agencies, employing a Research and Development methodology with an Extreme Programming model within an Agile framework; the system features modules for Performance Planning (Objectives, Strategic Plan, Performance Agreement, Action Plan), Performance Measurement, and Government Agency Performance Reporting (LKjIP). Testing with 44 respondents using the System Usability Scale (SUS) achieved an average score of 73.24% ("Good"), demonstrating that the application accelerates reporting, minimizes manual-input errors, and bolsters transparency and accountability in local SAKIP implementation.

**Keywords:** e-SAKIP, Government Agencies, Performance Evaluation, Extreme Programming (XP), System Usability Scale (SUS).

## 1. Pendahuluan

Perkembangan pesat era digital menuntut instansi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja. Evaluasi kinerja yang sistematis menjadi kunci agar setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa banyak instansi belum mampu menginventarisir pelaksanaan program secara terstruktur, sehingga pencatatan, pelaporan, dan analisis data belum dilakukan secara sistematis (Wildani et al., 2023).

Sebagian besar perangkat daerah masih bergantung pada dokumen fisik atau *spreadsheet* untuk menyusun laporan kinerja, yang menyulitkan sinkronisasi data, monitoring, dan evaluasi secara *real-time* (Hayati et al., 2022). Di Kabupaten Banjarnegara, proses manual ini berdampak pada kesulitan menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu, sehingga pengambilan keputusan berbasis data menjadi terhambat (Pratama et al., 2020). Hal ini dapat menyebabkan data tidak valid, pemborosan sumber daya, dan lambatnya pengambilan keputusan berbasis kinerja, sehingga menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Kurangnya akses digital juga menghambat transparansi dan akuntabilitas, yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, diperlukan sistem yang mampu mengotomatisasi evaluasi kinerja secara sistematis, akurat, dan efisien guna mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah (Rifansyah & Pertiwi, 2024).

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan. Implementasi sistem digital terbukti mampu menyempurnakan manajemen di berbagai bidang, termasuk dalam peningkatan kualitas layanan publik. Dengan sistem informasi kinerja, evaluasi dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan terintegrasi, sehingga memperkuat akuntabilitas kinerja secara menyeluruh (Manoharan et al., 2023).

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) diterapkan melalui enam tahapan yang saling terkait, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan perbaikan kinerja. Ada tahap perencanaan, visi, misi, serta sasaran strategis diuraikan menjadi indikator terukur, kemudian program dijalankan sesuai rencana. Selanjutnya, capaian kinerja diukur dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, lalu hasilnya menjadi dasar evaluasi efektivitas program. Melalui proses evaluasi, efisiensi berbagai kegiatan dinilai dan masukan perbaikan disusun untuk siklus berikutnya. Keseluruhan rangkaian ini dirancang untuk membangun sistem manajemen kinerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Gultom et al., 2022).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan merancang, membangun, dan menerapkan aplikasi e-SAKIP berbasis *website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Melalui implementasi sistem

terintegrasi ini, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan evaluasi kinerja instansi pemerintah, sekaligus mendukung terciptanya akuntabilitas publik yang lebih kuat.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah difusi ipteks dan pelatihan, yang dilaksanakan melalui serangkaian tahapan terstruktur dengan pendekatan *pendampingan langsung* kepada perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan ini dilakukan sebagai solusi atas permasalahan manualitas dalam pengelolaan evaluasi kinerja instansi pemerintah.

### a. Tahapan Kegiatan

#### 1) Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Tim pelaksana melakukan observasi dan wawancara kepada perangkat daerah untuk mengidentifikasi tantangan dalam pelaporan kinerja, seperti lambatnya pelaporan dan tidak sinkronnya data antar unit.

#### 2) Desain dan Pengembangan Aplikasi e-SAKIP

Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan perancangan aplikasi berbasis *web* menggunakan metode *Extreme Programming (XP)* dengan pendekatan *Agile*. Sistem dibangun menggunakan *PHP native*, *MySQL* sebagai basis data, serta antarmuka *web* yang responsif.

#### 3) Sosialisasi dan Pelatihan (Pelatihan dan Difusi Ipteks)

Kegiatan pelatihan dilaksanakan secara langsung kepada pengguna dari masing-masing OPD. Pelatihan mencakup:

- a) Penggunaan modul perencanaan (RPJMD, Sasaran, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi)
- b) Penginputan Kinerja Triwulan
- c) Penggunaan fitur cetak laporan LkjIP

#### 4) Pendampingan Teknis dan Mediasi Permasalahan Lapangan

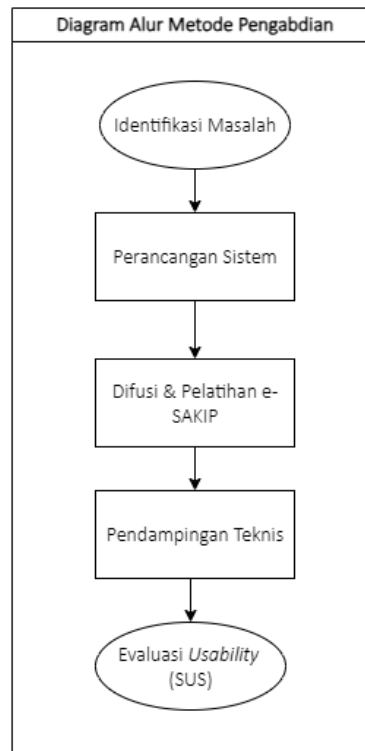
Setelah pelatihan, tim melaksanakan pendampingan secara berkala untuk memastikan aplikasi digunakan dengan optimal, serta memfasilitasi penyelesaian kendala teknis yang dihadapi pengguna.

#### 5) Evaluasi dan Umpan Balik

Evaluasi dilakukan dengan metode *System Usability Scale (SUS)* untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Hasilnya menunjukkan skor rata-rata sebesar 73,24%, yang termasuk kategori "Good".

### b. Diagram Alur Metode Pengabdian

Berikut diagram alur kegiatan pengabdian ditunjukkan pada Gambar 1:



Gambar 1. Diagram Alur Metode Pengabdian

## 2.2. Rumus

Pengukuran kinerja otomatis diwujudkan melalui implementasi dua rumus yang disesuaikan dengan sifat indikator:

- a. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dihitung dengan rumus 1.

$$\text{Capaian Kinerja (\%)} = \left( \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \quad (1)$$

Dalam pengukuran kinerja, realisasi menggambarkan nilai hasil yang berhasil dicapai dalam periode pengukuran, sedangkan target adalah nilai yang diharapkan atau telah ditetapkan sebelumnya. Apabila realisasi sama dengan target, capaian kinerja mencapai 100%. Nilai capaian di atas 100% menandakan pelampauan target, sementara nilai di bawah 100% menunjukkan target belum terpenuhi.

- b. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, dihitung dengan rumus 2.

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \left( \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \right) \times 100\% \quad (2)$$

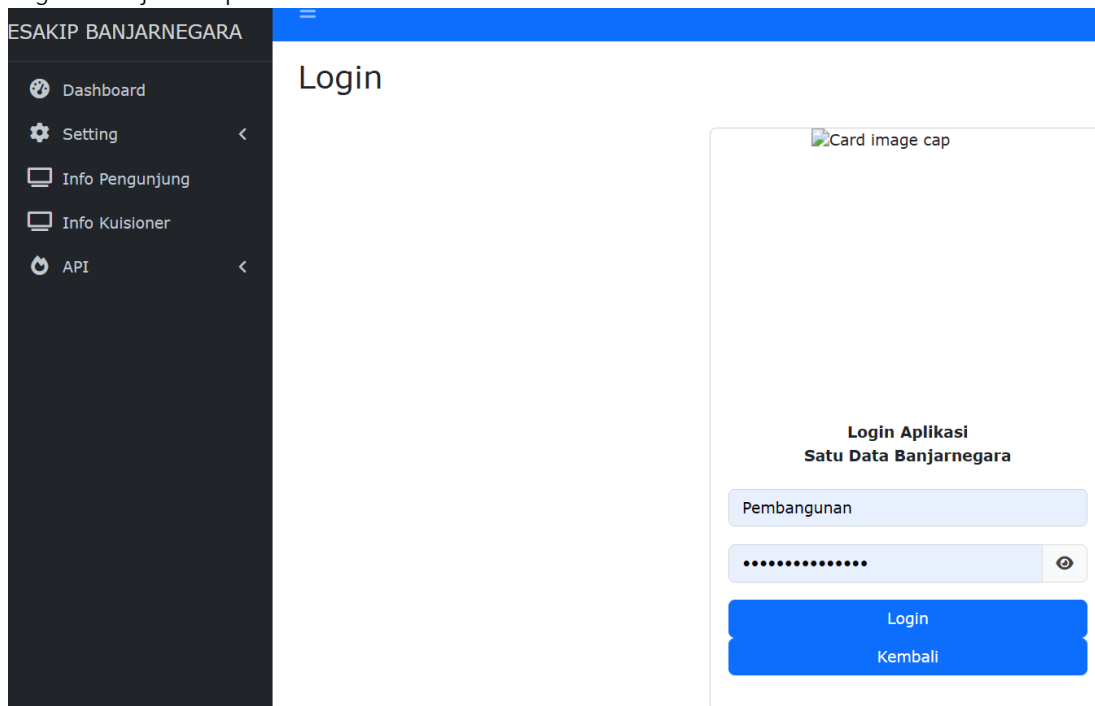
Dalam perhitungan capaian kinerja, apabila realisasi melebihi target—misalnya jumlah keluhan yang diterima lebih banyak dari yang diharapkan—maka nilai capaian akan menurun. Sebaliknya, ketika realisasi sama persis dengan target, capaian ditetapkan sebesar 100%. Jika

realisasi berada di bawah target—yang menunjukkan kinerja lebih baik daripada yang direncanakan—maka capaian akan melampaui 100%.

### 3. Hasil dan Pembahasan

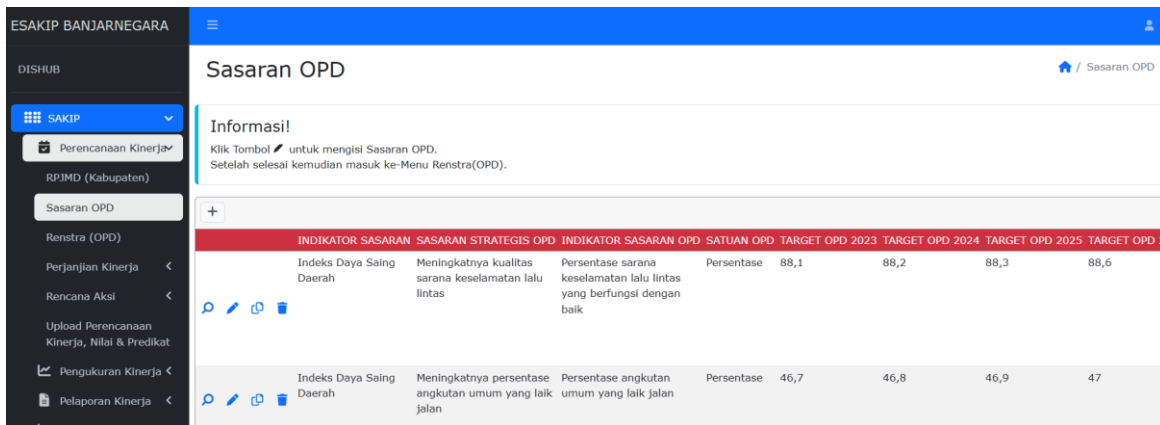
Kegiatan pengabdian ini menghasilkan sebuah aplikasi e-SAKIP berbasis *website* yang digunakan oleh perangkat daerah di Kabupaten Banjarnegara untuk mengelola, mengukur, dan melaporkan kinerja secara digital dan sistematis. Aplikasi ini dikembangkan dengan metode *Extreme Programming (XP)* dan pendekatan *Agile*, berfokus pada modul-modul perencanaan dan evaluasi kinerja: mulai dari Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP).

*Login* merupakan halaman yang pertama kali muncul ketika pengguna mengakses e-SAKIP ([https://esakip.banjarnegarakab.go.id/esakip\\_2025/backoffice/login](https://esakip.banjarnegarakab.go.id/esakip_2025/backoffice/login)). Halaman *login* berisi formulir autentikasi bagi pengguna OPD yang harus diisi dengan *username* dan *password*. Tampilan Halaman *Login* ditunjukkan pada Gambar 2.



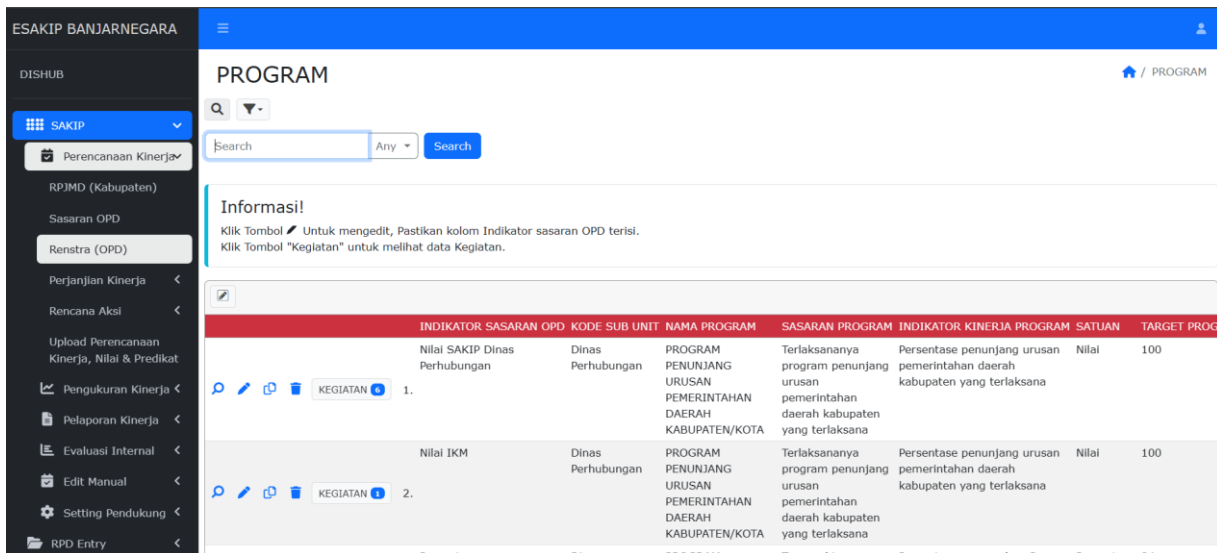
Gambar 2. Tampilan Halaman *Login*

Menu Sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimanfaatkan untuk menyajikan dan mengatur data terkait sasaran kinerja yang ditetapkan oleh masing-masing OPD. Di dalamnya ditampilkan keterhubungan antara Indikator Sasaran, Sasaran Strategis milik OPD, Indikator Sasaran OPD, Satuan, Target OPD 2023 hingga 2026, Sumber Anggaran, Pagu, Target OPD, dan Target Perubahan. Tampilan Halaman Sasaran OPD ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Tampilan Halaman Sasaran OPD

Menu Program berperan dalam mengelola dan menyusun daftar program yang selaras dengan pencapaian sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan Rencana Strategis masing-masing OPD. Renstra memastikan keselarasan langkah operasional dengan arah pembangunan daerah dan nasional, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi karena capaian kinerja dapat dievaluasi berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan. Tampilan Halaman Renstra ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Tampilan Halaman Renstra

Perjanjian Kinerja berfungsi sebagai dokumen formal yang mengikat antara pimpinan instansi dengan pejabat pelaksana untuk menetapkan sasaran, indikator, target, alokasi sumber daya, serta peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai kinerja yang telah disepakati. Dengan adanya Perjanjian Kinerja, setiap pejabat memiliki kejelasan mengenai ekspektasi kinerja dan tolok ukur keberhasilan, sehingga memudahkan pemantauan realisasi capaian secara periodik. Dokumen ini juga menjadi dasar evaluasi dan akuntabilitas, karena hasil pencapaian dievaluasi berdasarkan target yang tertuang di dalamnya, sekaligus menjadi landasan pemberian penghargaan maupun sanksi. Lewat Perjanjian Kinerja, budaya kinerja terstruktur dan berorientasi hasil semakin menegaskan keselarasan antara rencana strategis (Renstra) dan implementasi operasional instansi. Tampilan Halaman Perjanjian Kinerja ditunjukkan pada Gambar 5.

INDIKATOR SASARAN OPD	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	target 2023	target 2024	target 2025	target 2026	target 2027
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100	100	100	100	100
Nilai IKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100	100	100	100	100
Persentase sarana keselamatan lalu lintas yang berfungsi dengan baik	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN PRASARANA JALAN	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Jalan di Kabupaten	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Jalan di Kabupaten	34	35	36	37	35

Gambar 5. Tampilan Halaman Perjanjian Kinerja

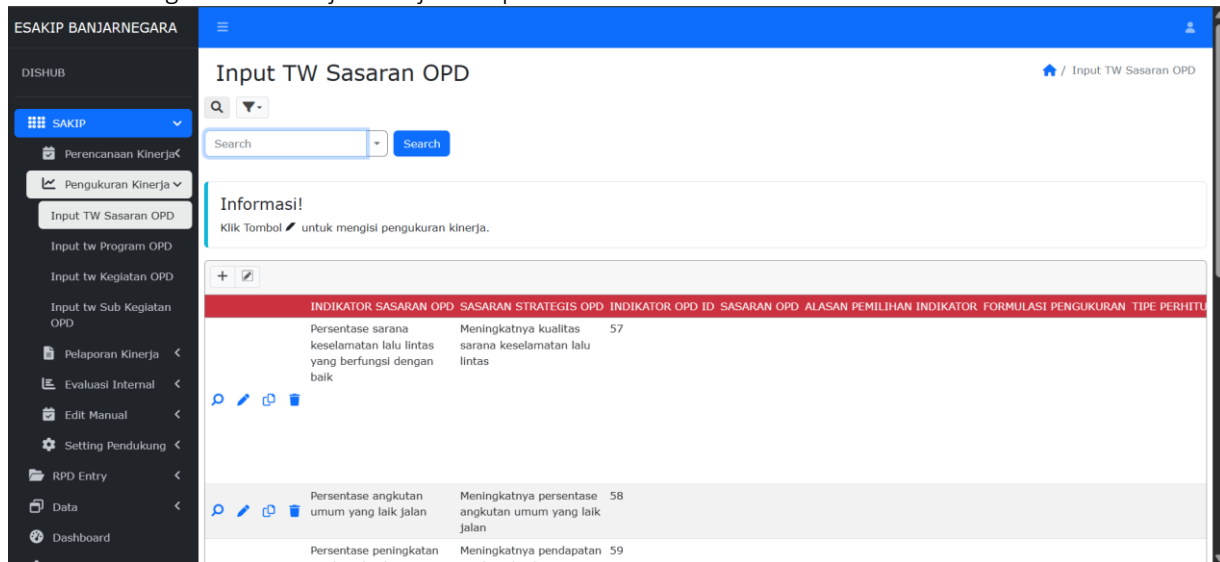
Dalam SAKIP, Rencana Aksi berfungsi sebagai dokumen operasional yang menerjemahkan sasaran dan indikator dalam Perjanjian Kinerja ke dalam langkah-langkah konkret, terjadwal, dan terukur, termasuk penetapan kegiatan, tenggat waktu, alokasi sumber daya, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan pelaporan. Dengan memecah target kinerja menjadi tugas-tugas spesifik, Rencana Aksi memudahkan pengawasan kemajuan, identifikasi hambatan sejak dini, dan pelaksanaan tindakan korektif tepat waktu. Keberadaannya memastikan koordinasi lintas unit lebih efektif, pemanfaatan anggaran optimal, serta evaluasi kinerja berbasis bukti semua demi mendorong peningkatan berkelanjutan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tampilan Halaman Rencana Aksi ditunjukkan pada Gambar 6.

INDIKATOR SASARAN OPD	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	FORMULASI	Target TW 1	Target TW 2	Target TW 3	Target TW 4	TARGET PROGRAM
Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	25	50	75	100	100
Nilai IKM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	25	50	75	100	100

Gambar 6. Tampilan Halaman Rencana Aksi

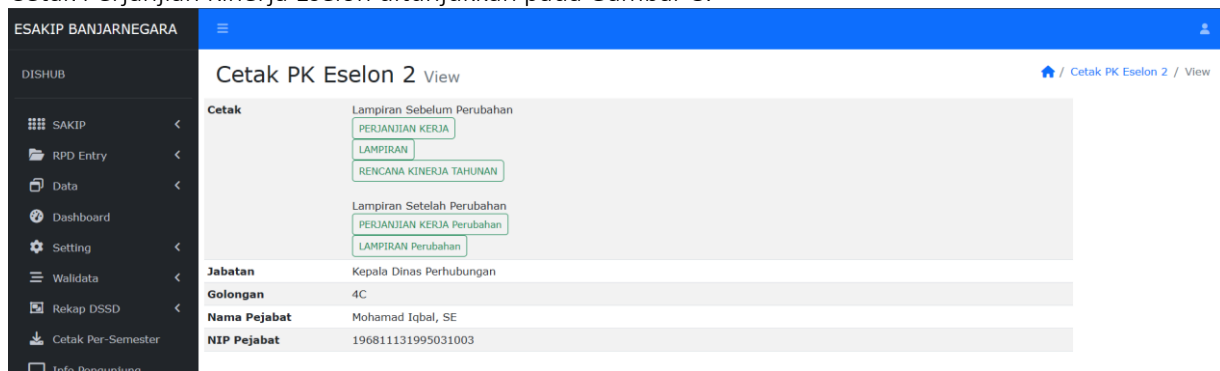
Dalam SAKIP, Pengukuran Kinerja berfungsi sebagai proses sistematis untuk menilai tingkat pencapaian hasil atas sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja. Melalui pengukuran ini, instansi dapat mengidentifikasi sejauh mana program dan kegiatan berkontribusi terhadap tujuan strategis, sekaligus memastikan penggunaan anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengukuran dilakukan secara berkala, biasanya per triwulan seperti ditunjukkan dalam sistem input "Input TW Sasaran/Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan OPD", untuk memantau progres, mendeteksi deviasi, dan menyusun rekomendasi perbaikan. Hasil pengukuran kinerja tidak hanya menjadi dasar evaluasi internal, tetapi juga digunakan dalam pelaporan

kepada publik dan pihak pengawas sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja. Tampilan Halaman Pengukuran Kinerja ditunjukkan pada Gambar 7.



Gambar 7. Tampilan Halaman Pengukuran Kinerja

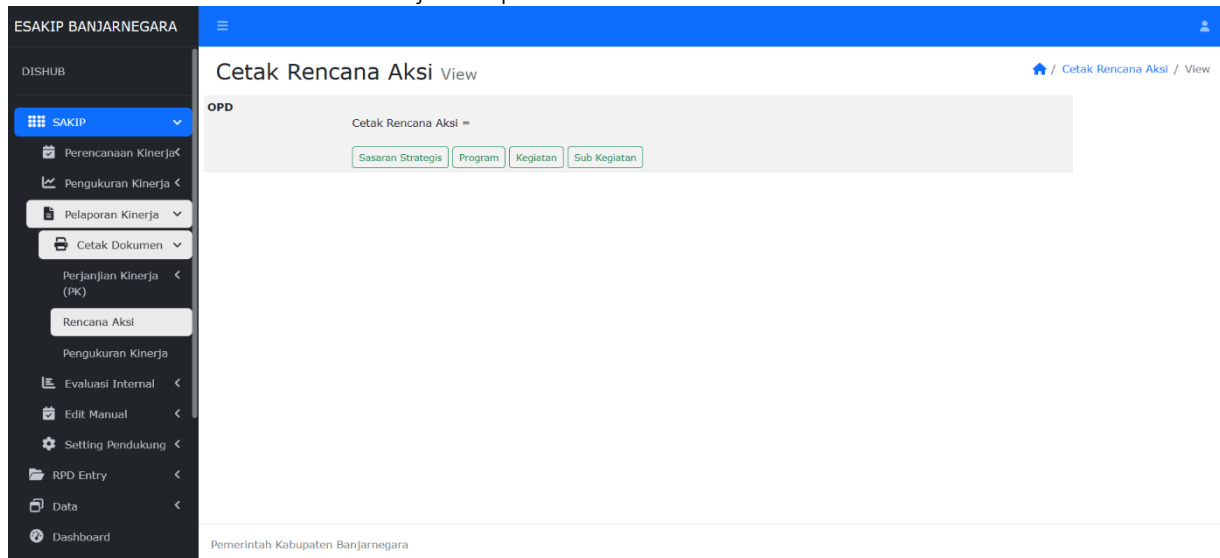
Fungsi *Cetak Perjanjian Kinerja Eselon* dalam SAKIP adalah untuk menghasilkan dokumen resmi yang memuat komitmen pejabat struktural (Eselon II, III, IV) terhadap pencapaian sasaran kinerja yang selaras dengan rencana strategis instansi. Dokumen ini mencakup indikator dan target yang harus dicapai, serta ditandatangani oleh pejabat dan atasan langsung sebagai bentuk akuntabilitas individual. Selain menjadi dasar evaluasi kinerja dan penilaian SKP, cetakan ini juga memperkuat keterkaitan antara kinerja individu dan organisasi, mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis hasil, serta meningkatkan transparansi dan pengawasan terhadap capaian kinerja secara berkala. Tampilan Halaman Cetak Perjanjian Kinerja Eselon ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8. Tampilan Halaman Cetak Perjanjian Kinerja

Fungsi *Cetak Rencana Aksi* dalam SAKIP adalah untuk menghasilkan dokumen rencana kerja terstruktur yang memuat tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan secara rinci, sesuai dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Fitur ini mendukung pengendalian dan monitoring pelaksanaan program/kegiatan, dengan memetakan siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana setiap langkah aksi dilakukan. Dokumen yang dicetak dari sistem tidak hanya menjadi alat bantu pelaksanaan kegiatan secara lebih terarah, tetapi juga memperkuat keterkaitan antara perencanaan dan implementasi serta menjadi bahan evaluasi atas pencapaian target kinerja. Dengan rencana aksi yang tercetak, instansi

memiliki instrumen transparan yang memperjelas proses pencapaian output dan outcome. Tampilan Halaman Cetak Rencana Aksi ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9. Tampilan Halaman Cetak Rencana Aksi

Fungsi *Cetak Pengukuran Kinerja* dalam SAKIP adalah untuk menghasilkan dokumen evaluasi kinerja secara kuantitatif dan terstruktur berdasarkan pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub-kegiatan pada tiap triwulan (TW 1–TW 4). Cetakan ini memuat data pengukuran kinerja yang telah diinput oleh perangkat daerah, sehingga menjadi bukti capaian realisasi dan dasar evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan rencana. Dokumen ini juga berfungsi untuk memperkuat akuntabilitas kinerja instansi, memfasilitasi monitoring berkala oleh pimpinan, serta sebagai lampiran pelaporan kinerja kepada publik atau instansi pengawas. Dengan format yang terstandarisasi dan terintegrasi dengan data perencanaan, fungsi cetak ini membantu memastikan keterkaitan antara *input*, *output*, dan *outcome*, serta mempercepat identifikasi deviasi atau pencapaian strategis. Tampilan Halaman Cetak Pengukuran Kinerja ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Tampilan Halaman Cetak Pengukuran Kinerja

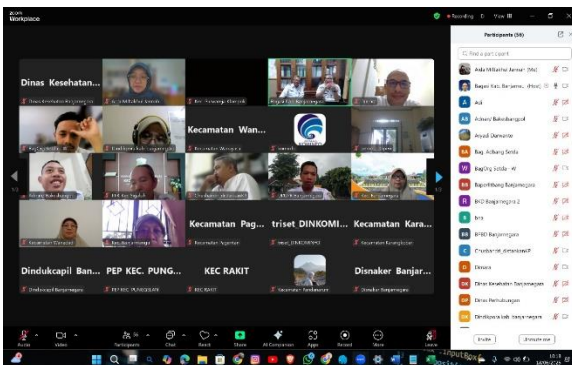
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di ruang kerja Bagian Organisasi, diikuti oleh Kepala Bagian Organisasi, pejabat struktural, serta tim pendamping dari pihak pengembang aplikasi. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penggunaan

aplikasi yang akan diterapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kegiatan Pelatihan ditunjukkan pada Gambar 11.



Gambar 11. Kegiatan Pelatihan

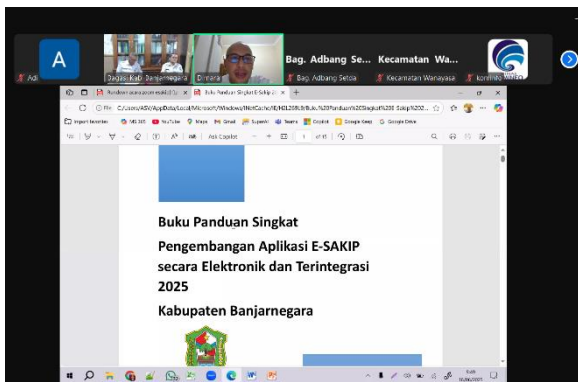
Paparan hasil penggunaan sistem juga dilakukan agar semua pegawai mampu memanfaatkan aplikasi secara optimal. Pelatihan ini dilaksanakan secara daring menggunakan *platform Zoom*. Dalam sesi pelatihan tersebut, peserta diberikan panduan langsung mengenai cara mengakses sistem, mengisi indikator kinerja, serta mengunggah data realisasi program. Selain itu, sesi tanya jawab interaktif juga difasilitasi untuk memastikan pemahaman peserta terhadap fitur-fitur yang tersedia dalam sistem. Pada tahap ini, sistem sudah mampu menghasilkan laporan kinerja secara otomatis berdasarkan *input* indikator dan realisasi program. Paparan Hasil ditunjukkan pada (Gambar 12), sambutan Kepala Bagian Organisasi: Turno, SIP (Gambar 13), panduan singkat: Dimara Kusuma Hakim, S.T., M.Cs., (Gambar 14) panduan pengisian data (Gambar 15).



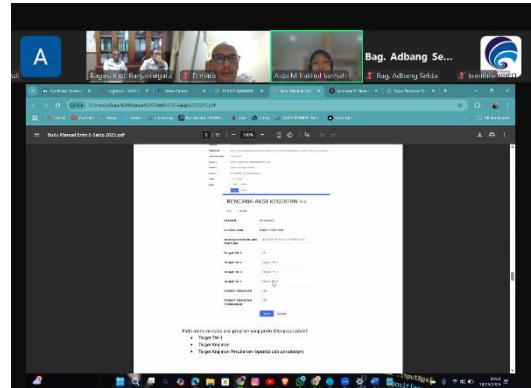
Gambar 12. Paparan Hasil



Gambar 13. Sambutan Kepala Organisasi



Gambar 14. Panduan Singkat dari Dimara Kusuma Hakim, S.T., M.Cs.



Gambar 15. Panduan Pengisian Data

Secara kuantitatif, efektivitas aplikasi diuji dengan metode *System Usability Scale (SUS)* yang melibatkan 44 responden. Hasilnya, rata-rata skor usability adalah 73,24, yang termasuk dalam kategori "Good". Rincian skor per item dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2 berikut:

Tabel 1. Hasil Pengujian SUS

Responden Ke-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	1	5	3	3	1	5	2	5	3
2	5	3	3	3	4	1	4	2	4	2
3	3	1	4	2	3	1	3	3	5	3
4	2	3	4	2	3	2	2	3	4	1
5	3	3	5	1	3	3	4	1	4	2
6	3	2	3	2	3	2	3	2	3	1
7	4	1	4	2	4	2	4	2	4	1
8	5	2	4	2	4	2	4	3	5	2
9	5	3	5	1	5	3	3	3	3	2
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	3	1	4	3	3	1	5	2	4	1

Tabel 2. Rekapitulasi Perhitungan SUS

Responden Ke-	Soal Ganjil	Soal Genap	Total	Skor SUS	Kategori
1	(5-1) + (5-1) + (3-1) + (5-1) + (5-1)	(5-1) + (5-3) + (5-1) + (5-2) + (5-3)	33 x 2,5	82.5	Good
2	(5-1) + (3-1) + (4-1) + (4-1) + (4-1)	(5-3) + (5-3) + (5-1) + (5-2) + (5-2)	29 x 2,5	72.5	Good
3	(3-1) + (4-1) + (3-1) + (3-1) + (5-1)	(5-1) + (5-2) + (5-1) + (5-3) + (5-3)	28 x 2,5	70	Good
4	(2-1) + (4-1) + (3-1) + (2-1) + (4-1)	(5-3) + (5-2) + (5-2) + (5-3) + (5-1)	24 x 2,5	60	OK

5	(3-1) + (5-1) + (3-1) + (4-1) + (4-1)	(5-3) + (5-1) + (5-3) + (5-1) + (5-2)	29 x 2,5	72.5	Good
6	(3-1) + (3-1) + (3-1) + (3-1) + (3-1)	(5-2) + (5-2) + (5-2) + (5-2) + (5-1)	26 x 2,5	65	OK
7	(4-1) + (4-1) + (4-1) + (4-1) + (4-1)	(5-1) + (5-2) + (5-2) + (5-2) + (5-1)	32 x 2,5	80	Good
8	(5-1) + (4-1) + (4-1) + (4-1) + (5-1)	(5-2) + (5-2) + (5-2) + (5-3) + (5-2)	31 x 2,5	77.5	Good
9	(5-1) + (5-1) + (5-1) + (3-1) + (3-1)	(5-3) + (5-1) + (5-3) + (5-3) + (5-2)	29 x 2,5	72.5	Good
...					
44	(3-1) + (4-1) + (3-1) + (5-1) + (4-1)	(5-1) + (5-3) + (5-1) + (5-2) + (5-1)	31 x 2,5	77.5	Good

#### 4. Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan sebuah aplikasi e-SAKIP berbasis *website* yang mampu mendukung proses evaluasi kinerja instansi pemerintah secara sistematis, efisien, dan akuntabel di Kabupaten Banjarnegara. Aplikasi ini terbukti mempermudah penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaporan kinerja, serta mempercepat proses pelaporan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan teknis, pengguna dari berbagai perangkat daerah dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik. Hasil evaluasi menggunakan System *Usability Scale (SUS)* menunjukkan skor 73,24% yang masuk dalam kategori “Good”, menandakan bahwa aplikasi ini cukup mudah digunakan dan diterima dengan baik oleh pengguna. Kelebihan utama dari aplikasi ini adalah kemampuannya mengintegrasikan seluruh tahapan SAKIP dalam satu platform digital, sementara kekurangannya terletak pada kebutuhan pelatihan awal yang intensif dan keterbatasan fleksibilitas untuk instansi dengan struktur indikator yang sangat kompleks. Meski demikian, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi sistem evaluasi kinerja dapat secara nyata meningkatkan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, khususnya Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Sains, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan seluruh perangkat daerah (OPD) yang telah berpartisipasi aktif dalam proses pelatihan, pendampingan, dan implementasi sistem e-SAKIP. Dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak sangat berkontribusi terhadap keberhasilan kegiatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, C. R. R., Zakaria, S., & Sutisna, J. (2022). Pengawasan Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Sakip Sebagai Upaya Penerapan Good Governance Pada Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.24198/janitra.v2i1.41098>
- Hayati, N., Fanani, M. R., & Azizah, U. (2022). Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis E-Government. *Kumpulan Jurnal Ilmu Komputer*, 9(3), 479–490.
- Manoharan, A. P., Melitski, J., & Holzer, M. (2023). Digital Governance: An Assessment of Performance and Best Practices. *Public Organization Review*, 23(1), 265–283. <https://doi.org/10.1007/s11115-021-00584-8>
- Pratama, M. A. A., Jeddawi, M., & Lukman, S. (2020). Penerapan Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(2), 365–386. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i2.288>
- Rifansyah, M. R., & Pertiwi, V. I. (2024). Penerapan E-Government Aplikasi Laki-El (Laporan Kinerja Elektronik) Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya INFO. 4(2). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Wildani, A. M., Nurmandi, A., Misran, & Subekti, D. (2023). Application of SP4N-LAPOR to Improve the Quality of Public Services and Information (Case Study in Indonesia). In *Communications in Computer and Information Science: Vol. 1835 CCIS* (Issue July). Springer Nature Switzerland. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5\\_38](https://doi.org/10.1007/978-3-031-36001-5_38)